MELIHAT GEJALA SOSIAL YANG ADA DIMASYARAKAT PADA ERA COVID-19

Revigadep Aurellia
Email: revigadepaurellia39@gmail.com
No BP: 2110003600290
Universitas Ekasakti Padang

A. PENDAHULUAN

Pandemi *Covid-19* telah merubah tatanan peradaban kehidupan sosial manusia. “Perubahan tersebut terlihat pada perubahan pola perilaku manusia itu sendiri, ketika mereka melakukan suatu aktivitas yang tidak biasanya mereka lakukan tetapi sudah menjadi hal yang biasa dilakukakan, maka hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang baru dalam kehidupan mereka.

Merebaknya virus Corona atau Covid 19 di beberapa Negara, menimbulkan dampak yang cukup signifikan dan menyebabkan adanya beberapa gejala sosial. Hal tersebut terlihat pada terpuruknya ekonomi, sehingga berimbas kepada banyaknya perusahaan yang tidak dapat bertahan. Akibatnya, terjadi banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga menambah jumlah pengangguran dan mendorong masyarakat berada di garis kemiskinan.

Gejala sosial adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. Gejala sosial seringkali disamakan dengan masalah sosial, penting untuk dimengerti bahwa hal ini tidak tepat. Namun, kedua konsep memang saling berkaitan erat. Untuk memudahkan kita dalam membedakan gejala sosial dengan masalah sosial, berikut adalah sebuah contoh yang dapat digunakan untuk memahami masing-masing konsep. Ketimpangan ekonomi merupakan sebuah gejala sosial, gejala sosial tersebut mengakibatkan terjadinya sebuah masalah sosial, yaitu

kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat miskin. Istilah "gejala" pada konsep ini berasal dari pendekatan positivisme, yaitu cabang ilmu sosial yang diturunkan dari tradisi ilmu alam.

Gejala-gejala sosial di dalam masyarakat yang tidak dikehendaki dan diinginkan oleh masyarakat dapat disebut masalah sosial. Hal ini merupakan gejala yang abnormal atau gejala-gejala yang patologis. Masalah-masalah sosial begitu mengganggu dan menghantui kehidupan manusia dalam kebudayaan dan peradabannya karena dapat dipastikan hal tersebut dapat menjauhkan manusia dari kesejatraannya

Berkurangnya mobilitas gerak manusia pada situasi pandemi Corona dipengaruhi perasaan takut tertular, perasaan ini yang sekarang banyak dirasakan semua manusia di dunia. Virus Covid-19 yang pertama kali muncul di Kota Wuhan Negara Cina pada Bulan Desember Tahun 2019, bergerak sangat cepat ke berbagai negara, sehingga merupakan suatu pandemi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) makna pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, lebih bermakna pada penyebaran virus yang menyebar secara cepat dan melanda seluruh negara-negara yang ada di dunia (Sitorus & Hidayat, 2020). Perasaan takut ini yang mendorong banyak orang baik melalui kesadaran sendiri atau dipaksa dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan *stay at home* dan *physical distancing* (jaga jarak) agar tidak tertular selain memakai masker dan cuci tangan. Fenomena ini membawa kehidupan manusia kedalam normalitas baru (*the new normal*) yang meliputi cara bekerja, cara belajar hingga cara bersosialisasi. Normalitas baru ini menciptakan *snowball effect* dan efek yang paling nyata adalah ekonomi.

Melihat. "Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada pasal 4, hal-hal yang dibatasi dan harus dipatuhi yaitu :

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
 - a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
2. Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
3. Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.”

B. PEMBAHASAN

COVID-19 atau Corona Virus Disease tahun 2019 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar dari virus yang bisa menyebabkan berbagai gejala ringan hingga berat. Dari segi gejalanya, keluarga virus ini seringkali menyerang di sistem pernapasan manusia. Setidaknya, terdapat dua jenis coronavirus yang juga pernah menyerang masyarakat Indonesia dan kasus penyebarannya cukup tinggi, yakni East Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV). Dan akhir-akhir ini, muncul coronavirus baru yang dinamakan dengan penyakit COVID-19. Menurut WHO (2020) berdasarkan panduan Surveilans Global, definisi COVID-19 dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yakni: (1) kasus terduga atau suspect case, (2) kasus probable atau probable case, dan (3) kasus terkonfirmasi atau pasien yang sudah terbukti positif melalui tes laboratorium. Sementara di Indonesia definisi klasifikasi kasus COVID-19 ini dibedakan menjadi: (1)

pasien dalam pengawasan atau PdP, (2) orang dalam pemantauan atau OdP, dan (3) orang tanpa gejala atau OTG (Kemenkes RI, 2020).

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adapun gejala umum yang akan dirasakan oleh penderita ketika terpapar COVID-19 adalah demam dengan suhu tubuh melebihi 38 derajat Celsius, timbul gejala batuk, sesak napas yang teramat hingga membutuhkan perawatan intens di rumah sakit. Meskipun begitu, setiap gejala yang muncul akan berbeda bagi setiap penderita. Apalagi pada beberapa kasus, gejala bisa diperberat ketika penderita merupakan kalangan usia lanjut serta mempunyai riwayat klinis penyakit penyerta lainnya atau komplikasi penyakit lain misalnya, penyakit paru obstruktif menahun, diabetes, kolesterol tinggi, penyakit jantung. Pun penyebaran virus corona ini akan cepat mengenai seseorang ketika memiliki daya tahan tubuh yang lemah.

Gejala sosial dapat terjadi di mana saja, baik di perkotaan maupun pedesaan. Namun, di wilayah perkotaan, profesi lebih beragam daripada pedesaan. Masyarakat di perkotaan pun cenderung heterogen, berbeda dengan di pedesaan yang lebih homogen. Selain itu stratifikasi dan diferensiasi sosial di pedesaan lebih sederhana daripada perkotaan.

Gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah fenomena sosial. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak dapat kita hindari, namun kita masih dapat mengantisipasinya. Perubahan sosial ada yang bersifat positif dan negatif, sehingga kita harus hati-hati dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Fenomena sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan masalah sosial. Adapun beberapa contoh fenomena sosial seperti munculnya kesenjangan sosial, demam musik luar (boyband/girlband), pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Gejala sosial juga diartikan sebagai suatu peristiwa yang

sering terjadi pada lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern.

Macam-macam gejala sosial antara lain:

1. Gejala sosial religious, misalnya perayaan panen padi
2. Gejala sosial ekonomi, misalnya gejala menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran
3. Gejala sosial politik, misalnya terjadinya praktik politik uang untuk memenangkan pemilu
4. Gejala sosial hukum, misalnya ketidakdisiplin pengendara sepeda motor di jalan raya

Perubahan sosial dalam masyarakat dapat berdampak positif maupun negatif. Bagi masyarakat yang tidak dapat menerima perubahan sosial maka akan terjadi masalah sosial. Adapun contoh gejala sosial yang ada pada masyarakat.

1. Kemiskinan Dalam sosiologi, kemiskinan merupakan suatu gejala sosial yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Gejala sosial ini terjadi diberbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:
 - a. Kemiskinan absolut, yaitu seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya.
 - b. Kemiskinan relatif, yaitu seseorang atau sekelompok orang dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya, namun dirinya masih merasa miskin bila dibandingkan dengan orang lain atau kelompok lain.

Kemiskinan dapat dikarenakan tidak mampunya seseorang dalam memenuhi kebutuhankebutuhan primer. Namun dalam sosiologi, salah satu faktor penyebab

munculnya masalah tersebut karena lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik, yaitu lembaga kemasyarakatan dibidang ekonomi. Permasalahan tersebut dapat menyebar kebidang lainnya, seperti pendidikan, sosial, dsb.

2. Masalah remaja

Masa remaja adalah masa pencarian jati diri sehingga banyak remaja yang meniru tingkah laku orang lain. Tindakan remaja bila tidak terkontrol dapat menjadi suatu masalah sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Masalah remaja ini ditandai oleh adanya keinginan untuk melawan ataupun sikap apatis. Pada masa ini seharusnya mereka mengenal nilai dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Dengan mempelajari norma di masyarakat, diharapkan mereka dapat berperilaku dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Prilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dapat beragam, sebagai contoh membolos, mencontek, pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya.

3. Masalah kependudukan

Indonesia adalah negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang padat. Penduduk merupakan sumber penting bagi pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk menjadi subjek dan obyek pembangunan. Dengan adanya pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk disuatu negara. kesejahteraan penduduk juga mengalami gangguan yang dipengaruhi oleh perubahan demografis yang sering sekali tidak dirasakan. Masalah kependudukan dapat berupa kepadatan penduduk, pemerataan penduduk yang tidak rata, ledakan penduduk dsb. Masalah-masalah diatas perlu adanya penanggulangan, karena dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Adapun beberapa cara untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya:

Kementerian Ketenagakerjaan merilis data tenaga kerja untuk Bulan Mei Tahun 2020: 1,7 juta tenaga kerja formal dirumahkan, 749,4 ribu mengalami PHK, dan 100 ribu pekerja migran dipulangkan (Sugiri, 2020). Melihat waktu rilis data tersebut, dipastikan jumlahnya semakin bertambah mengingat sampai dengan pertengahan Bulan Oktober Tahun 2020 pandemi Covid-19 belum usai. Oleh karena itu, lembaga serikat pekerja Indonesia pada banyak kesempatan yang ditayangkan di media televisi ataupun koran meminta pemerintah agar bisa mengambil langkah tegas mengenai nasib tenaga kerja Indonesia.

Pemutusan hubungan kerja yang memunculkan pengangguran baru merupakan permasalahan sosial tersendiri, jika tidak segera dikelola dengan baik akan meningkatkan permasalahan lainnya. Dampak berkurangnya atau hilangnya pendapatan bisa memicu tindakan-tindakan penyimpangan sosial sebagai upaya pemenuhan kebutuhan apabila terbatasnya solusi, menurunnya pendapatan tentunya berpengaruh langsung pada aspek kesehatan dan pendidikan. Pada bidang kesehatan bukan hanya berkaitan dengan berkurangnya kemampuan pemanfaatan jaminan kesehatan saja, akan tetapi berpengaruh juga dalam mengkondisikan makanan sehat untuk diri sendiri dan keluarga.

Sama dengan bidang pendidikan, dampaknya pada berkurangnya perhatian terhadap bidang pendidikan karena berkurangnya kemampuan finansial, terlihat dari menurunnya jumlah penerimaan mahasiswa baru Tahun 2020 dan terjadi peningkatan mahasiswa yang mengambil cuti semester.

Sudah 5 Tahun terakhir pemerintah menjalankan kebijakan investasi ori dan sukuk, sebagai bentuk penanaman dana yang dijamin oleh pemerintah dengan bunga tinggi di bank-bank milik negara. Selama pandemi presentase bunga kedua bentuk investasi itu naik diiringi diturunkannya suku bunga untuk tabungan dan deposito. Bentuk kedua kebijakan tersebut

sangat menarik serta menguntungkan komunitas kelas menengah dan atas yang memiliki dana simpanan berlebih. Situasi pandemi berpengaruh pada dunia usaha secara menyeluruh yang membuat para pelaku usaha melakukan tindakan *wait and see*, beralih bidang usaha, atau menanamkan modal usahanya kedalam surat berharga. Kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mendapatkan dana (*fresh money*) pembangunan dengan meminjam uang ke masyarakat dan sudah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya menggunakan pendekatan surat berharga ori dan sukuk. Bentuk kebijakan ekonomi ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak stabil, mengurangi uang negara. Sedikit memberikan pemahaman mengenai alasan pemerintah tidak memberlakukan *lockdown* dan selalu mempertimbangkan pendekatan ekonomi dalam mencegah meluasnya pandemi corona di Indonesia.

Keterlibatan dalam penyelesaian masalah sosial tidak boleh bersifat *charity*, tapi pemberdayaan. Untuk usaha kecil dan menengah bisa menggunakan pendekatan model kewirausahaan sosial integratif dan bersinggungan, pelaku usaha memperkerjakan tetangga atau saudaranya tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya pengalaman target atau klien. Memperkerjakan disini merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat *learning by doing*. Tentunya, peran klien disesuaikan kebisaannya untuk meminimalisir resiko kerugian usaha karena dalam pendekatan kewirausahaan sosial memiliki tujuan *profit oriented* juga.

C. PENUTUP

Pembahasan mengenai gejala sosial yang ada di masyarakat menjadi hal yang sangat penting, karena gejala sosial merupakan suatu fenomena yang ditandai dengan timbulnya permasalahan sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tingkah laku setiap individu di dalam lingkungan kehidupannya.

Penciptaan serta pengembangan pasar dan menyelesaikan permasalahan sosial dalam satu kegiatan pemberdayaan bisa didekatkan dengan pendekatan konsep kewirausahaan sosial. Keduanya saling berhubungan sehingga berkembangnya pasar yang berhasil diciptakan mengakibatkan berlanjutnya program sosialnya (reinvestasi sosial). Oleh karena itu, penciptaan pasar tidak hanya sebatas pengkondisian sistem produksi usaha yang dijalankan komunitas sasaran. Namun, melebar sampai lembaga pemberdaya memposisikan dirinya sebagai *owner* atau pemilik usaha yang memiliki target keuntungan usaha kegiatan pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..